

2023 LKJIP DISPERKIM KOTA DUMAI



“Berkhidmat Infrastruktur
Bantuan Rumah bagi Masyarakat, Penataan
Permukiman dan Penanganan Kawasan
Kumuh”

perkimtan.dumaiKota.go.id



disperkimkd22@gmail.com

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1. Kedudukan.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
3. Sumber Daya	6
4. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Isu Strategis	10
1.5. Cascading Kinerja	12
1.6. Peta Proses Bisnis	14
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI.....	19
2.1. Rencana Strategis.....	19
2.2. Tujuan Dan Sasaran	20
2.3. Kebijakan, Strategi Dan Program	22
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	31
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	47
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	51
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	53

3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	53
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	60
3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
3.8. Prestasi dan Penghargaan.....	63
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Langkah Perbaikan.....	65
LAMPIRAN.....	xxiii
1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	xxiv
2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	xxvi
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	xxvii
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan.....	xxx
5. Pengukuran Kinerja.....	xxxii
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	xxxiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	xxiv
2. Rencana Kinerja Tahun 2023	xxvi
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xxvii
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan	xxx
5. Pengukuran Kinerja	xxxii
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023	xxiii

DAFTAR TABEL

Tabel X.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2023	xv
Tabel X.2 Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	xv
Tabel X.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023	xvii
Tabel X.4 Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	xviii
Tabel X.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tahun 2023	xix
Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	6
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu	7
Tabel 1.4 Data Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.....	7
Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	11
Tabel 1.6 Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.....	13
Tabel 1.7 Matriks Peta Proses Bisnis Diperkimtan Kota Dumai	14
Tabel 1.8 Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP	16
Tabel 1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	17
Tabel 2.4 Monitoring Rencana Aksi atas kinerja secara berkala	17
Tabel 2.5 Matriks FGD Dalev Renstra pada tahun 2023	18
Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja.....	22
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023	22
Tabel 2.2 Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Perkimtan.....	23
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perkimtan	26
Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 Dinas Perkimtan	32

Tabel 3.3 Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Dumai	35
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	48
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	51
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	53
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal.....	54
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	54
Tabel 3.9 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas).....	58
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	60
Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Pengurangan Kumuh Kota Dumai.....	33
Gambar 3.2 Bantuan Rumah Layak Huni Jl Parit Paman.....	36
Gambar 3.3 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Tanjung Palas	36
Gambar 3.4 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Purnama	36
Gambar 3.5 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Bagan Keladi.....	37
Gambar 3.6 Bantuan Rumah Layak Huni Jl. Arifin Ahmad	37
Gambar 3.7 Dokumen DED Kumuh Kota Dumai.....	38
Gambar 3.8 Dokumen Identifikasi Perumahan.....	40
Gambar 3.9 Lokasi Banjir Di Kelurahan Bukit Datuk	40
Gambar 3.10 Dokumen Identifikasi Lahan Potensial.....	41
Gambar 3.11 Peta Citra Rekomendasi Lahan Potensial Kelurahan Mekar Sari	42
Gambar 3.12 DED Perumahan bagi korban bencana	43
Gambar 3.13 Perspektif DED Perumahan bagi korban bencana	43
Gambar 3.14 Grafik Peningkatan Infrastruktur PSU.....	44
Gambar 3.15 Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Meranti II Gg. Cendana	45
Gambar 3.16 Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Tengku Ahmad Gg. Pinang	45
Gambar 3.17 Pembangunan PSU Kota Dumai JL. Samudra Gg. Wan Ibrahim.....	45
Gambar 3.18 Gambar Kerja Perspektif (DED) PSU Kota Dumai 2023	46

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 15 Januari 2024

**PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI**



SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19681025 199002 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

5. Pelaksana administrasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2016 yaitu **“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”** dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Meningkatnya Infrastruktur Kota”**.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 3 (Tiga) Tujuan dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggung jawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 8 (Delapan) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

9 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

10 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

11 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

12 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

13 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

14 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

15 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

16 Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

7 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

17 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

18 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2023 mengalami 1 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel X.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	39,96 %
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100 %
2.	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	48,2 %
3.	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	40 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 15.550.235.262 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 8 (*Delapan*) Program Kerja antara lain :

Tabel X.2 Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 343.000.000	APBD
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 939.000.000	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 250.000.000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 1.454.200.000	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 30.000.000	APBD
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 225.021.600	APBD
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 169.978.400	APBD
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.533.495.262	APBD
	JUMLAH	Rp 8.549.695.262	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel X.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 377.400.000	APBD
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 910.050.000	APBD
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 4.920.940.000	APBD dan BANKEU
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 2.559.200.000	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 30.000.000	APBD
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 325.021.600	APBD
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 169.978.400	APBD
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.257.645.262	APBD
	JUMLAH	Rp 15.550.235.262	

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel X.4 Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Tercapainya perumahan dan	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	39,96	88,00	220,22	✓	-	-	-
2.	kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00	✓	-	-	-
3.	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	48,20	156,00	323,65	✓	-	-	-
4.	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	40,00	48,00	120,00	✓	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori satu (1) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 15.550.235.262 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) bersumber dari APBD dan DAK. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp.

12.656.996.703 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 2.893.238.559 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	12.656.996.703
2.	Belanja Modal	:	Rp.	2.893.238.559
	Jumlah	:	Rp.	15.550.235.262

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel X.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN 2022 (%)	ALOKASI	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN 2022 (%)
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98	94,00	134,32			
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96	88,00	220,22			
	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00			
Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan	Persentase Peningkatan PSU	%	48,20	156,00	323,65			

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN 2022 (%)	ALOKASI	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN 2022 (%)
dan kawasan permukiman								
Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,20	156,00	323,65			
Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40,00	48,00	120,00			
Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40,00	48,00	120,00			
Program Pengembangan Perumahan						Rp377.400.000	Rp357.406.962	94,70%
Program Kawasan Permukiman						Rp910.050.000	Rp866.246.308	95,19%
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh						Rp4.920.940.000	Rp4.858.833.797	98,74%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)						Rp2.559.200.000	Rp2.548.457.142	99,58%
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						Rp30.000.000	Rp26.260.100	87,53%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						Rp325.021.600	Rp205.724.057	63,30%
Program Penatagunaan Tanah						Rp169.978.400	Rp108.511.027	63,84%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel X.6 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA%	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	220,22%	98,18%	2,24
2.	permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	94,70%	1,06
3.	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	323,65%	99,44%	3,25
4.	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	120%	63,48%	1,89

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh* persentase capaian kinerja tahun 2023 (220,22%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,18%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota* persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,70%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi

- penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU* persentase capaian kinerja tahun 2023 (323,65%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
 4. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota* persentase capaian kinerja tahun 2023 (120%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (63,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKJIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

1. Penyusunan LKJIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021));
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri D).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kedudukan

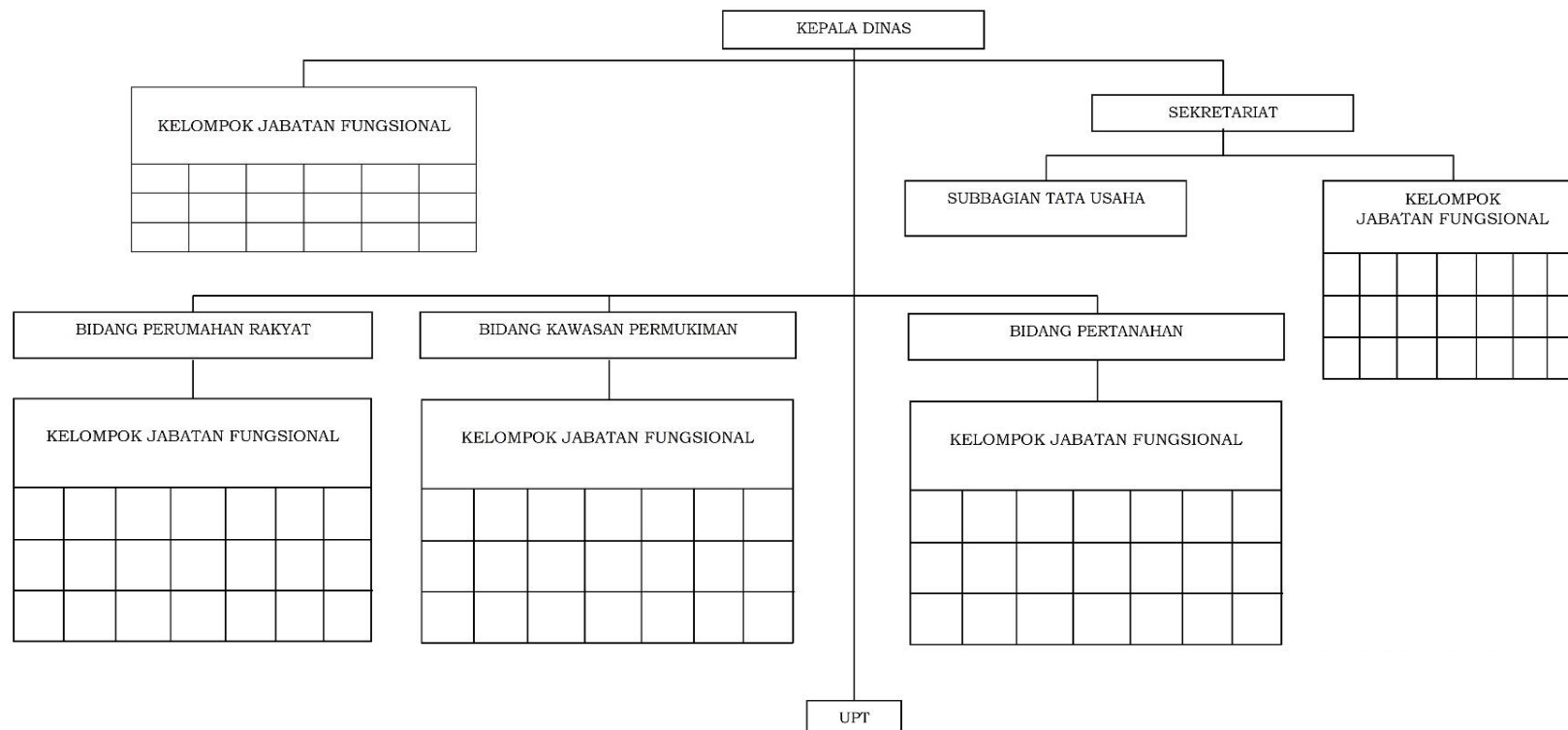
Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memedomani Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai tanggal 27 Mei 2022, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai, sebagai berikut.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mempunyai tugas:

“Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.”

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mempunyai fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksana administrasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

3. Sumber Daya

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 61 orang, yang terdiri atas:

Golongan IV / Eselon II	= 1 orang
Golongan IV / Eselon III	= 1 orang
Golongan III / Eselon III	= 3 orang
Golongan III / Eselon IV	= 1 orang
Golongan IV / Fungsional	= 1 orang
Golongan III / Fungsional	= 8 orang
Golongan III / Pelaksana	= 10 orang
Golongan II / Pelaksana	= 4 orang
Honorar (Non PNS)	= 32 orang

Berdasarkan Golongan Ruang, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)				Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
1.	Sekretariat	2	7	1	-	6	4	10
2.	Perumahan Rakyat	-	5	2	-	5	2	7
3.	Kawasan Permukiman	1	6	1	-	7	1	8
4.	Pertanahan	-	4	-	-	3	1	4
5.	UPT	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	1	-	7	2	6	4	10
2.	Perumahan Rakyat	-	-	1	1	4	1	5	2	7
3.	Kawasan Permukiman	-	-	1	-	6	1	7	1	8
4.	Pertanahan	-	-	-	-	3	1	3	1	4

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

No.	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Teknik	8	5	13
2.	Sarjana Sosial	6	-	6
3.	Sarjana Ekonomi	2	-	2
4.	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	1	2
5.	Sarjana Arsitektur	-	1	1
6.	Sarjana Pendidikan	1	-	1
7.	Diploma III Ekonomi	1	-	1

Inventarisasi aset sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai

No.	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 buah
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 buah
3.	Mesin Fotokopi	1 unit

No.	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
4.	Komputer	7 unit
5.	Laptop	10 unit
6.	Printer	8 unit

4. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Produk Hukum yang menjadi landasan agar terciptanya ekosistem kerja yang akuntabel, yakni sebagai berikut:

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 33 Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri D)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Strategi Sanitasi Kota Dumai
12. SK Walikota Dumai Nomor 922 Tahun 2021 tentang Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa
15. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Dumai 2018
16. Peraturan Menteri Penataan Ruang RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah No. 7/2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pertanahan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Isu Strategis

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas & fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berdasarkan RPJMD dan Renstra sebagai berikut:

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT
2. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%
3. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman

4. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menjabarkan dan mencari simpul dari permasalahan yang telah menghambat/menghalangi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai. Penjabaran permasalahan pokok dalam pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

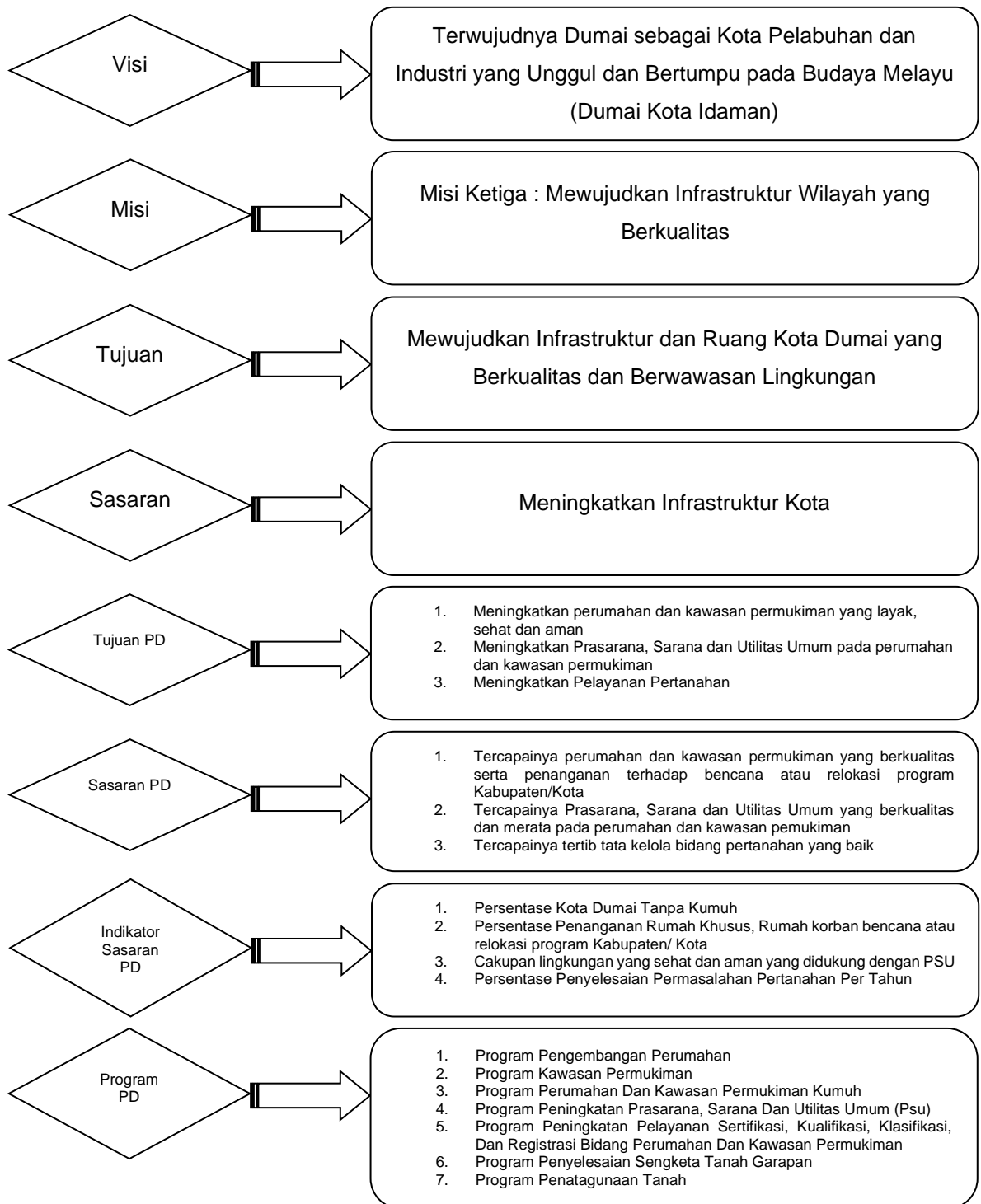
Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya pemukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak Jangkauan 2.2 penyediaan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	2.1.1 Besarnya jumlah pemukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya pemukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur

1.5. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.6 Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai



1.6. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Tabel 1.7 Matriks Peta Proses Bisnis Disperkimtan Kota Dumai

Sumber: Peta Proses Bisnis Disperkimtan Kota Dumai 2023

PROSES BISNIS/ sasaran		SUB PROSES BISNIS/ strategi		Peta Lintas Fungsi	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
PKP 01	Tercapainya penanganan terhadap rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang optimal	PKP 01.01	Melaksanakan penyediaan bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PKP 01.01.01	Pendataan rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.02	Sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.03	Pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.04	Serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
PKP 02	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	PKP 02.01	Mengoptimalkan tertib administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	PKP 02.01.01	Penerbitan regulasi atau kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
				PKP 02.01.02	Registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
		PKP 02.02	Menurunkan nilai deliniasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh	PKP 02.02.01	Perencanaan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha

PROSES BISNIS/ sasaran		SUB PROSES BISNIS/ strategi		Peta Lintas Fungsi	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
				PKP 02.02.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
				PKP 02.02.03	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
				PKP 02.02.04	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
PKP 03	Tercapainya prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	PKP 03.01	Melaksanakan penyediaan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	PKP 03.01.01	Perencanaan penyediaan PSU perumahan
				PKP 03.01.02	Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
PKP 04	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	PKP 04.01	Meningkatkan penyelesaian sengketa tanah garapan	PKP 04.01.01	Inventarisasi sengketa tanah dalam daerah Kabupaten/Kota
				PKP 04.01.02	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota
				PKP 04.02.01	Pemetaan zona tanah kewenangan Kabupaten/Kota
		PKP 04.02	Meningkatkan penatagunaan tanah		

PROSES PENDUKUNG

- PKP 05 Perencanaan Strategis
- PKP 06 Penganggaran
- PKP 07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset

PROSES LAINNYA

- PKP 08 Audit Mutu Internal (Evaluasi Hasil Kinerja)

1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/LHE-SAKIP/09/INSP Tanggal 24 Oktober 2022 Hal Penyampaian LHE implementasi SAKIP Tahun 2022, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.8 Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	Dokumen Perencanaan Kinerja, Laporan Kinerja belum dipublikasikan
2.		Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja belum memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi).;
3.		Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala; dan
4.		Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Disperkimtan telah melakukan publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja pada media milik disperkimtan yang dapat diakses secara publik (perkimtan.dumaikota.go.id)	Juni 2023
2.	Disperkimtan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara konvensional (dalam bentuk laporan LKJIP, emonev, dsb) maupun dengan penggunaan teknologi yakni dalam aplikasi DUMAI BERKHIDMAT (dumai-berkhidmat.my.id)	Juni 2023
3.	Disperkimtan telah melakukan monitoring Rencana Aksi atas kinerja secara berkala (Per Triwulan)	Januari 2023
4.	Disperkimtan berusaha untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dalam bentuk langkah-langkah nyata guna mendapatkan hasil sesuai target perencanaan di mana akan dipertanggung jawabkan dan tertuang pada LKJIP tahun 2023 pada awal Tahun 2024 mendatang	Januari 2024
5.	Disperkimtan Juga melakukan FGD Dalev Renstra pada tahun 2023 dan melakukan monitoring inkonsistensi terhadap Reja-RKPD-Renstra dan telah melakukan justifikasi teknis terhadap kegiatan yang inkonsisten akibat faktor-faktor teknis akibat peraturan yang berlaku	Agustus 2023

Tabel 2.4 Monitoring Rencana Aksi atas kinerja secara berkala

**EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEMESTER 1
TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan						Keterangan	Penanggung Jawab	
					TW 1			TW 2					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target (6)	Realisasi (7)	Persen (8)	Target (10)	Realisasi (11)	Persen (12)	(13)	(14)	
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98								Kegiatan FISIK Belum dapat berjalan dikarenakan anggaran kegiatan berasal dari banku dan dalam proses verifikasi penerima, pekerjaan FISIK akan dilaksanakan pada semester ke 2 tahun berjalan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN BDIANG PERUMAHAN
		1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96	0	0	0%	10	0	0%			
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Penanganan Rumah 2 Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	0	0	0%	20	18,58	19%	Tidak ada permasalahan	BIDANG PERUMAHAN	
		Persentase Peningkatan PSU	%	48,23									
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2	0	0	0%	24,1	37	77%	Tidak ada permasalahan	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40									
		1 Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40	10	10	10%	20	20	20%	Tidak ada permasalahan	BIDANG PERTANAHAN	



Tabel 2.5 Matriks FGD Dalev Renstra pada tahun 2023

Formulir

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Rencana Strategis
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai
Kota Dumai
Periode Renstra : 2021-2026

RPJMD Kota Dumai	RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
<p>Visi: "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik. 	<p>Visi: "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik. <p>Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah misi ke-3</p>	✓		<ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah tidak dicantumkan lagi pada Renstra. 		

RPJMD Kota Dumai	RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
<p>PERTANAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat 			<p>Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah tentang penetapan indikator kinerja utama OPD berdasarkan program dan kegiatan yang dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan kondisi sosial ekonomi dan pembangunan Kota Dumai</p>		
<p>Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan: Tercantum pada BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah</p>	<p>Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan: Tercantum pada BAB 8 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan</p>		X	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Program masih belum sinkron terhadap RPJMD terbaru (berdasarkan rumusan perhitungan terbaru pada RPJMD seperti luas kawasan kumuh yang dimutakhirkan setelah Renstra OPD di susun) 	<p>Melakukan Penyesuaian yang di tuangkan dalam dokumen draft perubahan Renstra Disperkimtan pada Tahun 2023</p>	<p>Dokumen Perubahan Renstra Disperkimtan 2021-2026</p>

Dumai, Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai



ADY SURYA HERLAMBAANG, S.Sos
 NIP. 19651122 198901 1 001

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, risiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun ke depan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Ke pelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Ke pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas”

2.2. Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai sesuai tugas

pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, di mana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun
2023

Sumber: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

VISI: Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)					
MISI KE 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	59,26 Indeks	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	60,77%

2.3. Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Perkimtan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu				
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Meningkatkan pengembangan perumahan dan penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
	2. Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	Meningkatkan kualitas pengembangan kawasan pemukiman	Penerbitan Izin/ regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu				
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
2. Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Menurunkan nilai delineasi perumahan dan kawasan pemukiman kumuh	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3. Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	4. Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Pembangunan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penatagunaan Tanah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai

Sumber : Perubahan Renstra Disperkim Kota Dumai 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh
2		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota
3	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
4	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perkimtan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96
		2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	48,23
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1 Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 15.550.235.262 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 8 (*Delapan*) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 343.000.000	APBD
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 939.000.000	APBD
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 250.000.000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 1.454.200.000	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 30.000.000	APBD
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 225.021.600	APBD
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 169.978.400	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.533.495.262	APBD
	JUMLAH	Rp 8.549.695.262	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 377.400.000	APBD
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 910.050.000	APBD
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 4.920.940.000	APBD dan BANKEU
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 2.559.200.000	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 30.000.000	APBD
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 325.021.600	APBD
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 169.978.400	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.257.645.262	APBD
	JUMLAH	Rp 15.550.235.262	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, seberapa jauh efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari:

Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing indikator dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka pencapaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004):

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai di bawah 55	Tidak Berhasil
2.	Nilai ≥ 55 s/d < 70	Cukup Berhasil
3.	Nilai ≥ 70 s/d < 86	Berhasil
4.	Nilai ≥ 86 s/d < 100	Sangat berhasil

3.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.2 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 Dinas Perkimtan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		2022		2023				Keterangan
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian	
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	94,00%	244,00%	69,98%	94,00%	134,32%	Sangat berhasil	Pada Tahun 2023, pengurangan Kumuh stagnan karena pada tahun dimaksud terjadi perubahan kebijakan penanganan kumuh melalui dana DAK dengan pola Integrasi. Sehingga pada tahun dimaksud, kegiatan diprioritaskan untuk melaksanakan pencegahan kawasan kumuh (Pembangunan Rumah Layak Huni 65 Unit di luar kawasan kumuh di mana kegiatan ini tidak mengurangi nilai kumuh, namun mencegah kumuh baru muncul), serta persiapan DAK integrasi di Tahun 2024. Sementara Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan dengan pembuatan dokumen-dokumen identifikasi dan perencanaan terkait kegiatan tersebut.
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	88,00%	387,67%	39,96%	88,00%	220,22%	Sangat berhasil	
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat berhasil	
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	84,00%	238,50%	48,20%	156,00%	323,65%	Sangat berhasil	Pada Tahun 2023, Disperkimtan telah melaksanakan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di 18 lokasi dan melebihi dari target yang direncanakan pada Renstra Disperkimtan yaitu 12 lokasi. Sehingga predikat capaian yang dihasilkan yaitu sangat berhasil.
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	84,00%	238,50%	48,20%	156,00%	323,65%	Sangat berhasil	
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	20,00%	100,00%	40,00%	48,00%	120,00%	Sangat berhasil	Pada Tahun 2023, terdapat 7 kasus baru yang telah ditangani oleh Bidang Pertanahan Disperkimtan dan melebihi dari target yang direncanakan pada Renstra Disperkimtan yaitu 5 kasus per tahun. Sehingga predikat capaian yang dihasilkan yaitu sangat berhasil.
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	20,00%	100,00%	40,00%	48,00%	120,00%	Sangat berhasil	

Target dan capaian IKU dihitung berdasarkan Renstra Dinas Perkimtan Tahun 2021-2026 (sebelum perubahan kedua) yang disusun pada Februari Tahun 2022

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagai berikut:

Indikator Tujuan 1: Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

I. Indikator Sasaran 1/ IKU 1: Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

Capaian kinerja:

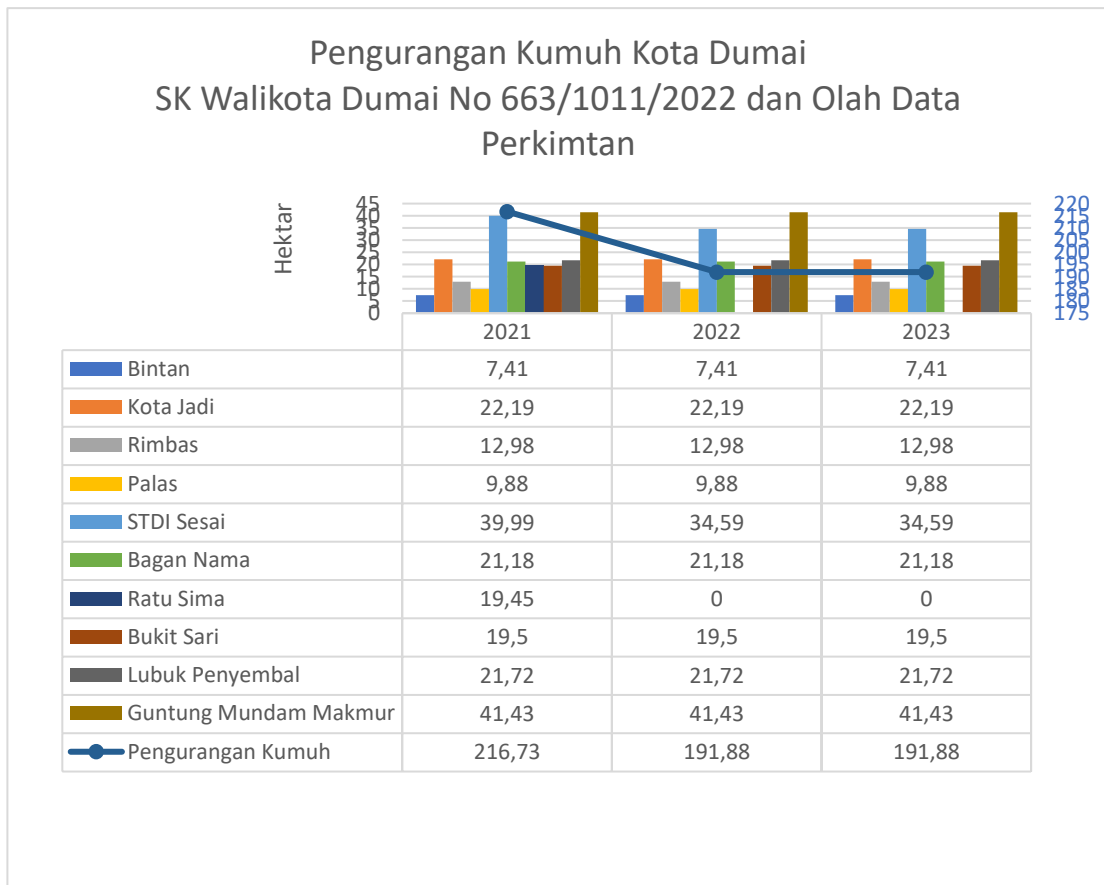
Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:

$$(Luasan pemukiman kumuh yang tertangani) / (Luas pemukiman kumuh) \times 100\%$$

Jumlah Luasan pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2023 seluas 24,85 Ha, Luas pemukiman kumuh di tahun 2023 seluas 28,24 Ha sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 88% dengan capaian 220 % bernilai kinerja Sangat Berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 88% atau tercapai sebesar 387,67% maka capaian tahun 2023 menurun.

Gambar 3.1 Grafik Pengurangan Kumuh Kota Dumai

Sumber : Bidang Kawasan Permukiman Disperkimtan Kota Dumai 2023



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator:

- a. Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengentaskan kawasan Kumuh Kota Dumai dengan memaksimalkan program yang ada dari berbagai sumber pendanaan;
- b. Antusiasme dan dukungan Masyarakat dalam melaksanakan pengentasan kawasan kumuh Kota Dumai Khususnya Bantuan Rumah Layak Huni ;
- c. Sumber daya yang memadai.

Faktor penghambat Capaian Indikator:

- a. Perubahan Regulasi pendanaan di tengah-tengah rencana strategis berjalan;
- b. Potensi Munculnya Kawasan Kumuh Baru di luar kawasan kumuh yang di tangani di tahun berkenaan

Tindak lanjut Capaian Indikator:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan kegiatan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru pada sub kegiatan *Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh),* sebanyak 65 Unit Rumah di 7 Kecamatan.



Gambar 3.2 Bantuan Rumah Layak Huni Jl Parit Paman

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023



Gambar 3.3 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Tanjung Palas

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023



Gambar 3.4 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Purnama

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023



Gambar 3.5 Bantuan Rumah Layak Huni Kel Bagan Keladi

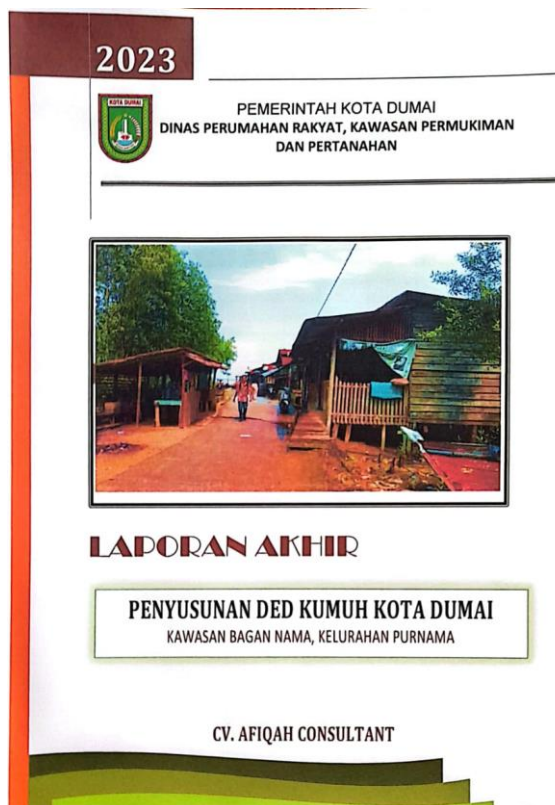
Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023



Gambar 3.6 Bantuan Rumah Layak Huni Jl. Arifin Ahmad

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Penyusunan DED Kumuh untuk mengetahui Luasan Kumuh yang secara detail serta berapa anggaran yang diperlukan untuk mengatasi kumuh Kota Dumai yang tersisa



Gambar 3.7 Dokumen DED Kumuh Kota Dumai

Sumber: Arsip Disperkimtan 2023

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Penyusunan RP2KPPK sebagai Rencana Induk Penanganan Kumuh serta dalam upaya pemenuhan Persyaratan pengajuan penanganan kawasan kumuh Kota Dumai yang bersumber dari dana APBN dan DAK

II. Indikator Sasaran 2/ IKU 2: Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota :

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:

$$\frac{(\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi})}{(\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu})} \times 100\%$$

Untuk indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota target yang ditetapkan tahun

2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 stagnan. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 maupun program relokasi pemerintah Kabupaten Kota, sehingga menurut amanat dari Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 perlu dilakukan pendataan dan identifikasi yang telah dilaksanakan dengan capaian 100 %

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator:

- a. Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Penanganan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota;
- b. Penanganan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota merupakan SPM Perumahan Rakyat;
- c. Sumber daya yang memadai.

Faktor penghambat Capaian Indikator:

- a. Adanya perbedaan regulasi terkait penanganan rumah korban bencana antara BNPB dan SPM PUPR yaitu bencana kebakaran, banjir, bukan merupakan bencana alam sehingga tidak/belum dapat di intervensi

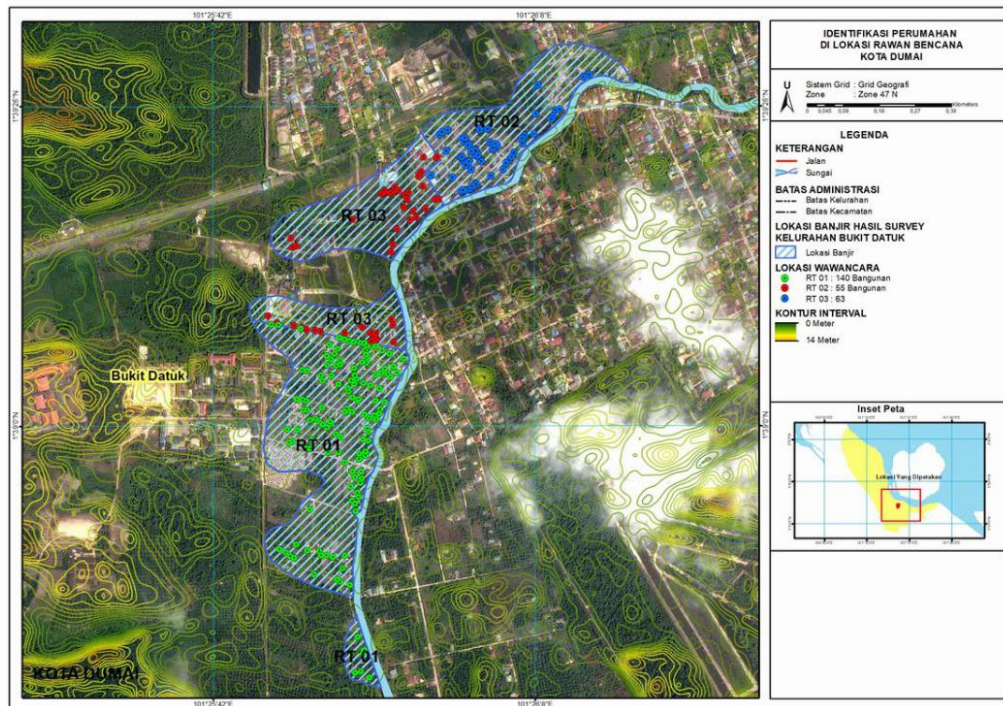
Tindak lanjut Capaian Indikator:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota di Kecamatan Dumai Selatan sebagai upaya pemenuhan SPM dan menginventarisasi rumah-rumah yang berpotensi terkena bencana untuk Tahun mendatang.



Gambar 3.8 Dokumen Identifikasi Perumahan

Sumber: Arsip Disperkimtan Kota Dumai 2023



Gambar 3.9 Lokasi Banjir Di Kelurahan Bukit Datuk

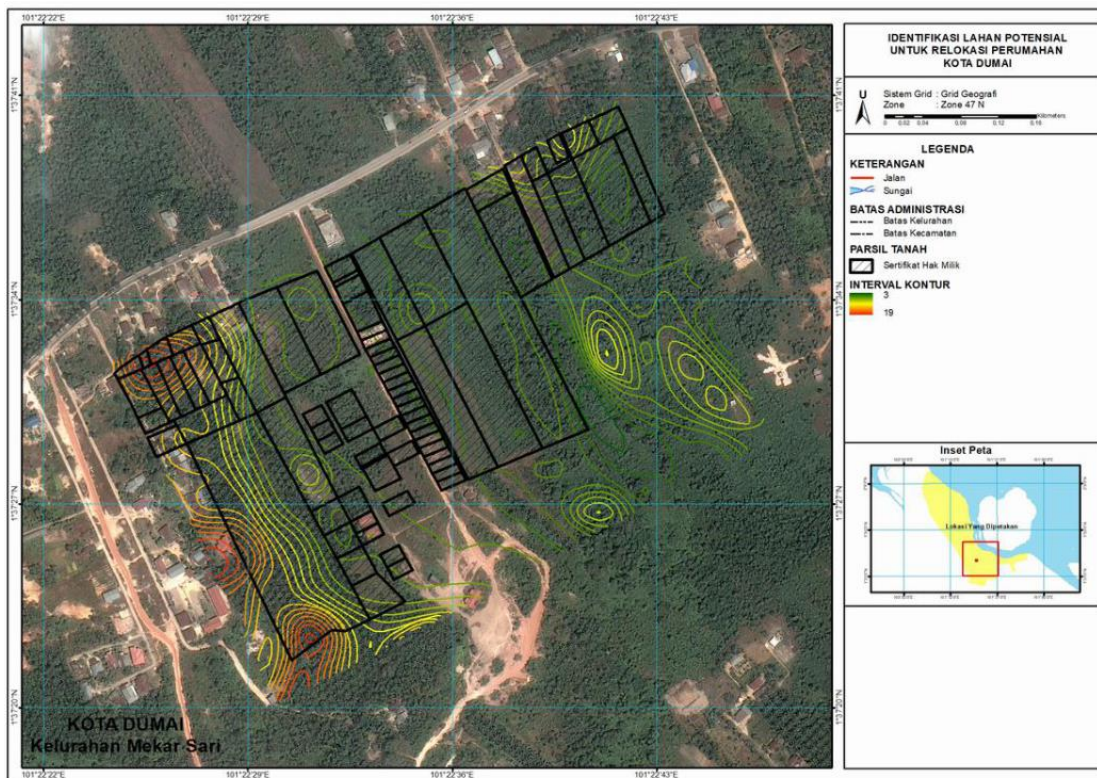
Sumber: Dokumen dentifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Di Dumai
Selatan Kota Dumai Tahun 2023

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Identifikasi lokasi Relokasi Perumahan (luasan dalam Ha) disertai dengan atribut wilayah, dan status milik (termasuk lahan milik Pemerintah Daerah) sesuai dengan format identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program Kabupaten/Kota



Gambar 3.10 Dokumen Identifikasi Lahan Potensial

Sumber: Arsip Disperkimtan Kota Dumai 2023



Gambar 3.11 Peta Citra Rekomendasi Lahan Potensial Kelurahan Mekar Sari

*Sumber: Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Relokasi
Perumahan di Kota Dumai Tahun 2023*

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Perumahan bagi korban bencana yang meliputi pembangunan rumah di Daerah relokasi rumah rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana dan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

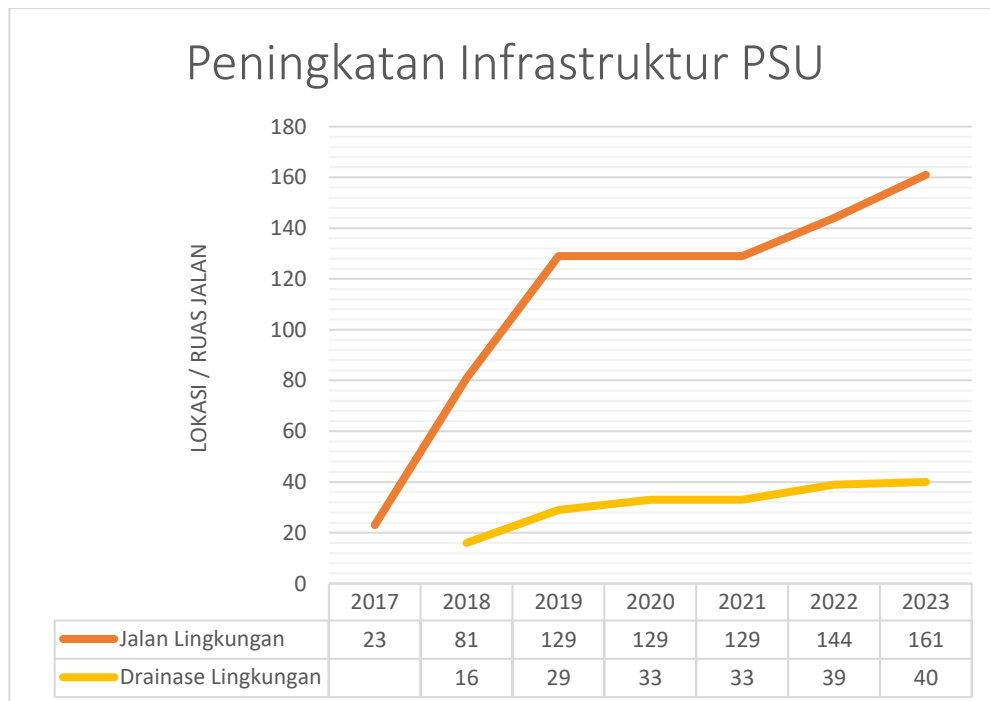
Indikator Tujuan 2: Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman

III. Indikator Sasaran 3 / IKU 3: Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU:

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:


$$(Jumlah\ lingkungan\ yang\ didukung\ PSU) / (Jumlah\ lingkungan\ perumahan) \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Pada Variabel *Jumlah lingkungan yang didukung PSU* terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan sebanyak 18 lokasi di akumulasikan dengan 21 lokasi pada tahun sebelumnya dengan total 39 Lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan, dibagi dengan *Jumlah lingkungan perumahan* sebanyak 25 Perumahan yang direncanakan, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 156% dari 48,2% dengan nilai capaian sebesar 238% bernilai kinerja Sangat Berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 84% dengan nilai capaian sebesar 238% maka capaian tahun 2023 Meningkat.



Gambar 3.14 Grafik Peningkatan Infrastruktur PSU

Sumber: Bidang Kawasan Permukiman Disperkimtan Kota Dumai 2023

<p>Pembangunan/Peningkatan PSU Kota Dumai- Jl.Meranti II Gg.Cendana Kel.Ratu Sima</p>		<p>2 0 2 3</p>
<p>Lokasi Kota Dumai</p>		
<p>Keterangan : Dokumentasi</p>		
<p>Pelaksana CV.RIZKI FAJAR</p>		

Gambar 3.15 Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Meranti II Gg. Cendana

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023

<p>Pembangunan/Peningkatan PSU Kota Dumai – Jl. Tengku Ahmad Gg. Pinang Kel. Bagan Besar Timur</p>		<p>2 0 2 3</p>
<p>Lokasi Kota Dumai</p>		
<p>Keterangan :</p>		
<p>Pelaksana CV. BERKAH SHAFIRA BALQIS</p>		

Gambar 3.16 Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Tengku Ahmad Gg. Pinang

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023

<p>Pembangunan/Peningkatan PSU Kota Dumai- Jl.Samudra Gg. Wan Ibrahim Kel.Purnama</p>		<p>2 0 2 3</p>
<p>Lokasi Kota Dumai</p>		
<p>Keterangan : Pemasangan Paving</p>		
<p>Pelaksana CV.SARI DUMAI MANDIRI</p>		

Gambar 3.17 Pembangunan PSU Kota Dumai JL. Samudra Gg. Wan Ibrahim

Sumber: Dokumentasi Disperkimtan 2023

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator:

- a. Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Penyediaan PSU Perumahan;
- b. Sumber daya yang memadai.

Faktor penghambat Capaian Indikator:

- a. Belum maksimalnya inventarisasi dan penyerahan Aset PSU Perumahan Oleh Developer kepada Pemerintah Kota Dumai, Sehingga terhambatnya penyediaan PSU yang Holistik terhadap perumahan yang belum memiliki PSU Perumahan

Tindak lanjut Capaian Indikator:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Penyusunan DED PSU sebagai acuan untuk membangun PSU Perumahan secara Holistik di tahun-tahun mendatang



Gambar 3.18 Gambar Kerja Perspektif (DED) PSU Kota Dumai 2023

Sumber: Arsip Disperkimtan Kota Dumai 2023

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan Percepatan penyerahan PSU Perumahan dari developer kepada Pemko dengan menginisiasi penerbitan Perwako Tentang serah terima Aset PSU Perumahan di Kota Dumai.

Indikator Tujuan 3: Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik

IV. Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:

$$(Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan / Jumlah\ kasus\ yang\ terdaftar) \times 100\%$$

Jumlah *Jumlah kasus yang diselesaikan* pada tahun 2023 sebanyak 7 Kasus, *Jumlah kasus yang terdaftar* di tahun 2023 Sebanyak 7 dari 5 Kasus yang direncanakan sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 48% dengan capaian 120% bernilai kinerja Sangat Berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100 % maka capaian tahun 2023 meningkat

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator:

- a. Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Penanganan Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat;
- b. Sumber daya yang memadai.

Faktor penghambat Capaian Indikator:

- a. Pembagian kewenangan Urusan Pertanahan yang sangat terbatas bagi Kabupaten Kota

Tindak lanjut Capaian Indikator:

- a. Bidang Pertanahan akan terus berperan aktif dalam upaya mediasi dan hadir mendampingi terkait masalah pertanahan dengan instansi Vertikal

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN	KATEGORI NILAI
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	61,35	94,00	69,98	94,00	100,00	Stagnan
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi atau program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,70	88,00	39,96	88,00	100,00	Stagnan
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Stagnan
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	35,20	84,00	48,20	156,00	185,71	Meningkat
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35,20	84,00	48,20	156,00	185,71	Meningkat
3	Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	20,00	20,00	40,00	48,00	240,00	Meningkat
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	20,00	20,00	40,00	48,00	240,00	Meningkat

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. IKU Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

- a. Pada Tahun 2022 berdasarkan Berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh kota Dumai menetapkan

pengurangan kumuh kota Dumai tahun 2022 sebanyak 24,85 ha dari total 41,53 ha (sebelumnya pada IKU ditetapkan 28,24 ha) dengan persentase capaian melebihi target 388 % pada 2 Kecamatan dan 2 kelurahan melalui intervensi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni guna Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 348 Unit dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 38 Unit.

- b. Pada Tahun 2023 di Kota Dumai tidak terjadi pengurangan kumuh diakibatkan perubahan kebijakan pusat atas dana DAK pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luasan di bawah 10 Ha yang merupakan kegiatan inti dalam pengurangan Kumuh (Perbaikan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh) di alih kan menjadi pola integrasi, sehingga realisasi pada IKU ini senilai 88 (stagnan) dengan persentase capaian senilai 220% (stagnan). Pada tahun dimaksud kegiatan di prioritaskan untuk melaksanakan pencegahan kawasan kumuh (Pembangunan Rumah Layak Huni 65 Unit di luar kawasan kumuh di mana kegiatan ini tidak mengurangi nilai kumuh, namun mencegah kumuh baru muncul), serta persiapan DAK integrasi di Tahun 2024
- c. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 88% atau tercapai sebesar 387,67% maka capaian tahun 2023 menurun.

2. IKU Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota

- a. Pada tahun 2022, tidak terjadi bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota di Kota Dumai. Namun, sebagai langkah awal pemenuhan SPM Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah dilakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota terdiri dari 3 Kecamatan dan 9 Kelurahan sepanjang 10 Km dengan rentang lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dihitung dari bibir pantai yang terletak di

Kelurahan Laksamana sampai dengan Sungai Dumai yang berada di Kelurahan Bumi Ayu.

- b. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 maupun program relokasi pemerintah Kabupaten Kota, sehingga menurut amanat dari Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 perlu dilakukan pendataan dan identifikasi yang telah dilaksanakan dengan capaian 100 %
- c. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 stagnan.

3. IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- a. Pada tahun 2022, terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan (non developer) sebanyak 21 lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan yang dibangun dengan realisasi terhadap target IKU sebesar 80% dari 35,2% melebihi target % capaian sebesar 227%.
- b. Pada tahun 2023, Pada Variabel *Jumlah lingkungan yang didukung PSU* terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan sebanyak 18 lokasi di akumulasikan dengan 21 lokasi pada tahun sebelumnya dengan total 39 Lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan, dibagi dengan *Jumlah lingkungan perumahan* sebanyak 25 Perumahan yang direncanakan, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 156% dari 48,2% dengan nilai capaian sebesar 238% bernilai kinerja memuaskan.
- c. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 84% dengan nilai capaian sebesar 238% maka capaian tahun 2023 Meningkat

4. IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- a. Pada tahun 2022, terdapat 5 kasus konflik pertanahan di Kota Dumai yang dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Telah dilakukan tindak lanjut dan mediasi terhadap seluruh kasus konflik pertanahan tersebut.

- b. Pada Tahun 2023 telah di selesaikan 7 dari 5 Kasus yang direncanakan sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 48% dengan capaian 120% bernilai kinerja memuaskan.
- c. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100 % maka capaian tahun 2023 meningkat

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	97,14	94,00	96,77
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	94,28	88,00	93,34
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00
2	<i>Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman</i>	<i>Persentase Peningkatan PSU</i>	%	100,00	156,00	156,00

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100,00	156,00	156,00
3	<i>Meningkatkan Pelayanan Pertanahan</i>	<i>Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun</i>	%	<i>100,00</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	100,00	48,00	48,00

Upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh:
Mempersiapkan Usulan Pengentasan Kawasan Kumuh Terintegrasi pada Kementerian PUPR. Pada tahun 2024 Kota Dumai berhasil mendapatkan DAK Integrasi Pengentasan Kawasan Kumuh Pangkalan Sesai.
2. Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota:
Melakukan Persiapan untuk menghadapi pemberian batuan bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan
 - a. Melakukan Identifikasi Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan
 - b. Melakukan Identifikasi Lahan Potensial bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan
 - c. Mempersiapkan pagu anggaran pada dokumen perencanaan
3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan SU:
 - a. Mengakomodir dan memprioritaskan usulan kebutuhan masyarakat
 - b. Mempercepat Serah Terima PSU dari Pengembang kepada Pemko Dumai

4. Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun
 - a. Mengakomodir dan memprioritaskan permasalahan yang masuk sesuai kebutuhan masyarakat

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI SPM NASIONAL	KATEGORI NILAI	KETERANGAN
<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	100,00	100,00	MEMUASKAN	Pencapaian SPM Perumahan Rakyat diamanatkan tercapai 100% dalam kondisi ada atau tidak adanya bencana alam. Di Kota Dumai pada tahun 2023 tidak terjadi bencana alam sehingga dilakukan pembuatan Dokumen Identifikasi Perumahan, Dokumen Identifikasi Lahan Potensial, dan DED Perumahan bagi korban bencana untuk mencapai target SPM dengan realisasi 100%.
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	MEMUASKAN	

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 15.550.235.262 (*lima belas milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bankeu Provinsi Riau. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 12.656.996.703 (*dua belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 2.893.238.559 (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta*

dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.890.068.849 (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 12.003.249.658 (dua belas milyar tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 2.886.819.191 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Belanja Operasi	12.656.996.703	12.003.249.658
2	Belanja Modal	2.893.238.559	2.886.819.191
	Jumlah	15.550.235.262	14.890.068.849

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.257.645.262	5.918.629.456	94,58%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.299.000	28.507.000	91,08%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000	6.200.000	98,43%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	22.307.000	89,23%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.810.082.419	3.527.285.119	92,58%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.803.783.419	3.524.224.119	92,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000	3.061.000	48,60%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.519.500	-	0,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.519.500	-	0,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	37.600.000	94,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	37.600.000	94,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.461.163	409.244.989	94,63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000	5.333.000	97,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.495.600	83.231.500	89,98%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.764.100	16.727.000	70,39%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.039.000	20.186.000	83,97%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.185.000	89,42%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.995.463	279.582.489	99,14%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	904.097.501	900.526.600	99,61%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96%
	Pengadaan Mebel	24.832.000	24.400.000	98,26%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.057.501	152.150.000	98,76%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	598.816.600	99,80%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.296.228	674.692.248	97,32%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.002.500	2.848.000	71,16%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000	10.400.000	99,05%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.888.000	4.884.000	99,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.905.728	656.560.248	97,43%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.889.451	340.773.500	99,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	138.390.000	136.978.500	98,98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.570.000	79.388.000	99,77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.505.714	18.310.000	93,87%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.423.737	106.097.000	99,69%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	377.400.000	357.406.962	94,70%
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	277.400.000	269.442.462	97,13%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	221.950.000	218.287.862	98,35%
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	45.450.000	45.354.600	99,79%
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.000.000	5.800.000	58,00%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	87.964.500	87,96%
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	87.964.500	87,96%
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	910.050.000	866.246.308	95,19%
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	471.050.000	459.805.748	97,61%
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	471.050.000	459.805.748	97,61%
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	339.000.000	312.225.120	92,10%
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	30.000.000	20.737.000	69,12%
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan	179.000.000	168.698.128	94,24%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	30.000.000	26.171.040	87,24%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100.000.000	96.618.952	96,62%
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.000.000	94.215.440	94,22%
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	50.000.000	49.940.000	99,88%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000	44.275.440	88,55%
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.920.940.000	4.858.833.797	98,74%
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.920.940.000	4.858.833.797	98,74%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.920.940.000	4.858.833.797	98,74%
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.559.200.000	2.548.457.142	99,58%
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.559.200.000	2.548.457.142	99,58%
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	180.000.000	179.870.000	99,93%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.314.200.000	2.305.005.642	99,60%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	65.000.000	63.581.500	97,82%
VI	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN	30.000.000	26.260.100	87,53%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	30.000.000	26.260.100	87,53%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	30.000.000	26.260.100	87,53%
VII	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	325.021.600	205.724.057	63,30%
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.021.600	205.724.057	63,30%
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.542.400	124.504.962	58,03%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.479.200	81.219.095	73,52%
VII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	169.978.400	108.511.027	63,84%
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	169.978.400	108.511.027	63,84%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	126.769.200	108.511.027	85,60%
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	43.209.200	-	0,00%

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA-RATA
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 377.400.000	Rp 357.406.962	94,70%	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 910.050.000	Rp 866.246.308	95,19%	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA-RATA
	penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 4.920.940.000	Rp 4.858.833.797	98,74%	
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 2.559.200.000	Rp 2.548.457.142	99,58%	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 30.000.000	Rp 26.260.100	87,53%	
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 325.021.600	Rp 205.724.057	63,30%	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 169.978.400	Rp 108.511.027	63,84%	

Total anggaran belanja adalah Rp 15.550.235.262 dengan realisasi Rp 14.890.068.849 atau dengan capaian sebesar 95,75% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Pada Bidang Pertanahan terdapat kegiatan yang overlap dengan BPN dan Stakeholder terkait sehingga dilakukan efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari Dinas Perkimtan.
2. Adanya mutasi pengurangan pegawai Dinas Perkimtan ke Perangkat Daerah lain sehingga gaji dan tunjangan ASN yang telah dipersiapkan tidak dapat digunakan.
3. Efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Perkimtan.

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALISA SI	CAPAI AN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	69,98%	94,00%	134,32%	6.208.390.000	6.082.487.067	97,97%
Sasaran : Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	39,96%	88,00%	220,22%	5.830.990.000	5.725.080.105	98,18%
	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	377.400.000	357.406.962	94,70%
Program : Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%			377.400.000	357.406.962	94,70%
Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55%			910.050.000	866.246.308	95,19%
Program : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	19%			4.920.940.000	4.858.833.797	98,74%
Tujuan : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase peningkatan PSU	48,23%	156,00%	323,65%	2.589.200.000	2.574.717.242	99,44%
Sasaran : Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	48,2%	156,00%	323,65%	2.589.200.000	2.574.717.242	99,44%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIA N (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
perumahan dan kawasan pemukiman							
Program : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48,32%			2.559.200.000	2.548.457.142	99,58%
Program : Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	40%			30.000.000	26.260.100	87,53%
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun	40%	48%	120%	495.000.000	314.235.084	63,48%
Sasaran : Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	40%	48%	120%	495.000.000	314.235.084	63,48%
Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40%			325.021.600	205.724.057	63,30%
Program : Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	40%			169.978.400	108.511.027	63,84%

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3/4
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	220,22%	98,18%	2,24
	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	94,70%	1,06
Tercapainya Prasarana, Sarana dan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	323,65%	99,44%	3,25

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3/4
Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	yang didukung dengan PSU			
Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	120%	63,48%	1,89

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh* tingkat efisiensinya adalah 2,24 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (220,22%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,18%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota* tingkat efisiensinya adalah 1,06 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,70%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU* tingkat efisiensinya adalah 3,25 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (323,65%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat* tingkat efisiensinya adalah 1,89 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (120%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (63,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan

bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***.

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam 7 (Tujuh) program, 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh 3 bidang yakni Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan serta 1 Sekretariat. Pada Tahun 2023 anggaran yang teralokasi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebesar Rp. 15.550.235.262 telah terealisasikan sebesar Rp. 14.890.068.849 atau 95,75%.

1. Untuk IKU Luasan Permukiman Kumuh di tahun 2023 seluas 28,24 Ha sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 88% dengan capaian 220 % bernilai kinerja Sangat Berhasil.
2. Untuk IKU Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil
3. Untuk IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan sebanyak 18 lokasi di akumulasikan dengan 21 lokasi pada tahun sebelumnya dengan total 39 Lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 156% dari 48,2% dengan nilai capaian sebesar 238% bernilai kinerja Sangat Berhasil.
4. Untuk IKU Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat sebanyak 7 Kasus, Jumlah Kasus yang Terdaftar di tahun 2023 Sebanyak 7 dari 5 Kasus yang direncanakan sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 48% dengan capaian 120% bernilai kinerja Sangat Berhasil.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala /hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Langkah Perbaikan

1. Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut.
3. Mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke pemda berjalan dengan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dan APBN, DAK, APBD Provinsi.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada secara maksimal.
5. Meningkatkan upaya koordinasi program kegiatan yang melibatkan APBN dan Bankeu Prov agar kegiatan terlaksana sesuai peraturan perundangan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 15 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

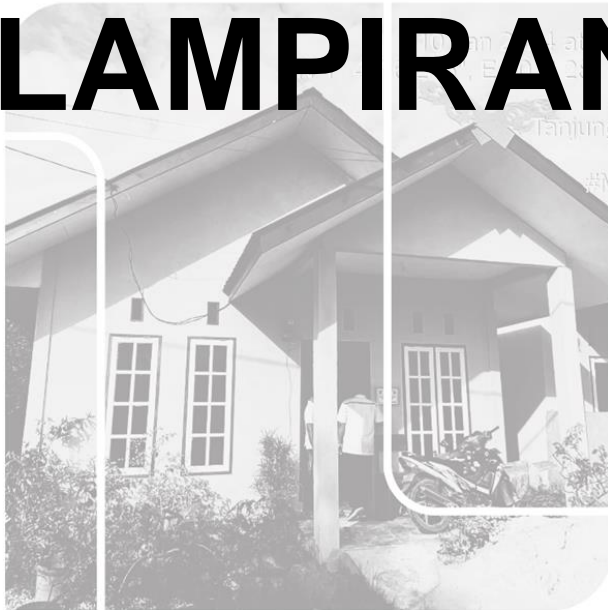


SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19681025 199002 1 001

LAMPIRAN



1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
MISI : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
SASARAN : Meningkatkan Infrastruktur Kota

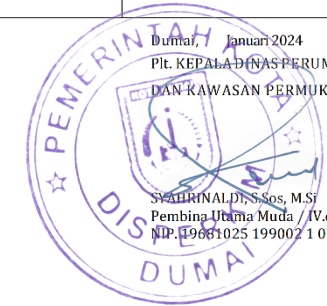
TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat pelayanan Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Rata-rata dari indikator sasaran (Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh + Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota + Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU)	n/a	33,33%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	Luas pemukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh dikali 100%	0%	0%	11,37%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tertib administrasi pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Menurunkan nilai deliniasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan regulasi atau kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum 	<ul style="list-style-type: none"> Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 	
											Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi dibagi jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu dikali 100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota 	

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAIPI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi jumlah lingkungan perumahan dikali 100%	n/a	n/a	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan penyediaan PSU perumahan Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian 	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

Dumai, Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

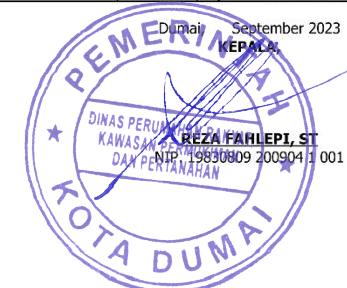
SyaikhURNALDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661025 199002 1 001



2. Rencana Kinerja Tahun 2023

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

No.	KINERJA UTAMA				PROGRAM			ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98				
		1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp 377.400.000
		2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	19%	Rp 4.920.940.000
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	48,23				
		1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48%	Rp 2.559.200.000
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat dan registrasi pengembang perumahan	40%	Rp 30.000.000
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40				
		1 Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40%	325.021.600
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	40%	Rp 169.978.400
							Jumlah	Rp 9.292.590.000



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ADY SURYA HERLAMBANG, S.Sos**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

H. ADY SURYA HERLAMBANG, S.Sos
NIP. 19651122198901 1001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98
		1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96
		2 Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	48,23
		1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2
3	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40
		1 Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40

1 Sasaran 1

Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

PROGRAM			
1. PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.		343.000.000
PROGRAM			
2. KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.		939.000.000
PROGRAM			
3. KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp.		250.000.000

2 Sasaran 2

Tercapainya Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum
yang berkualitas dan
merata pada perumahan
dan kawasan permukiman

**4. PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
(PSU)** Rp. 1.454.200.000

**5. PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI,
KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI
BIDANG
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN** Rp. 30.000.000

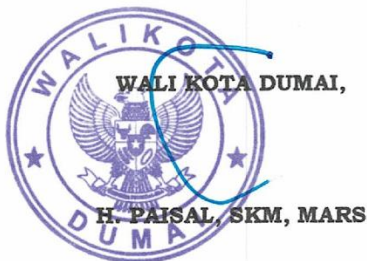
3 Sasaran 3

Tercapainya tertib tatakelola
bidang pertanahan yang
baik

**6. PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA
TANAH GARAPAN
PROGRAM** Rp. 225.021.600

**7. PENATAGUNAAN
TANAH** Rp. 169.978.400

JUMLAH Rp. 3.411.200.000



WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023

Pt. KEPALA,

H.ADY SURYA HERLAMBANG, S.Sos

NIP. 196511221989011001

4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **REZA FAHLEPI, ST**
J a b a t a n : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA



REZA FAHLEPI, ST
NIP. 19830809 200904 1 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh 2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	% %	39,96 100
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	48,23
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40
	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	1 Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40

1 Sasaran 1

Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.	377.400.000
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	910.050.000
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp.	4.920.940.000

2 Sasaran 2

Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.	2.559.200.000
5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	30.000.000

3 Sasaran 3

Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik

6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp.	325.021.600
7. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp.	169.978.400
Jumlah	Rp.	9.292.590.000



5. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	$\frac{\text{Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh} + \text{Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota} + \text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU}}{3} \times 100\%$	64,77%		
		Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	$\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}}$	33,60%		
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$	100%	100%	100%
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$	60,71%		
2.	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	40%	48%	>100%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 15.550.235.262
Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 14.890.068.849
Persentase Capaian Program Tahun 2023 : Rp 95,75%

Dumai, Januari 2024
Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.257.645.262	5.918.629.456	100%	94,58%	339.015.806
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.299.000	28.507.000	100%	91,08%	2.792.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000	6.200.000	100%	98,43%	99.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	22.307.000	100%	89,23%	2.693.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.810.082.419	3.527.285.119	100%	92,58%	282.797.300
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.803.783.419	3.524.224.119	100%	92,65%	279.559.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000	3.061.000	100%	48,60%	3.238.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.519.500	-	100%	0,00%	2.519.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.519.500	-		0,00%	2.519.500
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	37.600.000	100%	94,00%	2.400.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	37.600.000	100%	94,00%	2.400.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.461.163	409.244.989	100%	94,63%	23.216.174
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000	5.333.000	100%	97,19%	154.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.495.600	83.231.500	100%	89,98%	9.264.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.764.100	16.727.000	100%	70,39%	7.037.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.039.000	20.186.000	100%	83,97%	3.853.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.185.000	100%	89,42%	495.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.995.463	279.582.489	100%	99,14%	2.412.974
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	904.097.501	900.526.600	100%	99,61%	3.570.901
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	100%	99,96%	48.000
	Pengadaan Mebel	24.832.000	24.400.000	100%	98,26%	432.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.057.501	152.150.000	100%	98,76%	1.907.501
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	598.816.600	100%	99,80%	1.183.400
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.296.228	674.692.248	100%	97,32%	18.603.980
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.002.500	2.848.000	100%	71,16%	1.154.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000	10.400.000	100%	99,05%	100.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.888.000	4.884.000	100%	99,92%	4.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.905.728	656.560.248	100%	97,43%	17.345.480
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.889.451	340.773.500	100%	99,09%	3.115.951
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.390.000	136.978.500	100%	98,98%	1.411.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.570.000	79.388.000	100%	99,77%	182.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.505.714	18.310.000	100%	93,87%	1.195.714
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.423.737	106.097.000	100%	99,69%	326.737
II	PROGRAM PENGEMBANGAN	377.400.000	357.406.962	100%	94,70%	19.993.038

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
	PERUMAHAN					
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	277.400.000	269.442.462	100%	97,13%	7.957.538
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	221.950.000	218.287.862	100%	98,35%	3.662.138
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	45.450.000	45.354.600	100%	99,79%	95.400
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.000.000	5.800.000	100%	58,00%	4.200.000
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	87.964.500	100%	87,96%	12.035.500
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	87.964.500	100%	87,96%	12.035.500
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	910.050.000	866.246.308	100%	95,19%	43.803.692
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	471.050.000	459.805.748	100%	97,61%	11.244.252
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	471.050.000	459.805.748	100%	97,61%	11.244.252
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	339.000.000	312.225.120	100%	92,10%	26.774.880
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	30.000.000	20.737.000	100%	69,12%	9.263.000
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	179.000.000	168.698.128	100%	94,24%	10.301.872

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	30.000.000	26.171.040	100%	87,24%	3.828.960
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100.000.000	96.618.952	100%	96,62%	3.381.048
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.000.000	94.215.440	100%	94,22%	5.784.560
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	50.000.000	49.940.000	100%	99,88%	60.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000	44.275.440	100%	88,55%	5.724.560
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.920.940.000	4.858.833.797	100%	98,74%	62.106.203
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.920.940.000	4.858.833.797	100%	98,74%	62.106.203
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.920.940.000	4.858.833.797	100%	98,74%	62.106.203
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.559.200.000	2.548.457.142	100%	99,58%	10.742.858
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.559.200.000	2.548.457.142	100%	99,58%	10.742.858
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	180.000.000	179.870.000	100%	99,93%	130.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.314.200.000	2.305.005.642	100%	99,60%	9.194.358
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	65.000.000	63.581.500	100%	97,82%	1.418.500
VI	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000	26.260.100	100%	87,53%	3.739.900
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	30.000.000	26.260.100	100%	87,53%	3.739.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	30.000.000	26.260.100	100%	87,53%	3.739.900
VII	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	325.021.600	205.724.057	100%	63,30%	119.297.543
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.021.600	205.724.057	100%	63,30%	119.297.543
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.542.400	124.504.962	100%	58,03%	90.037.438
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.479.200	81.219.095	100%	73,52%	29.260.105
VII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	169.978.400	108.511.027	100%	63,84%	61.467.373
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam	169.978.400	108.511.027	100%	63,84%	61.467.373

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
	satu Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	126.769.200	108.511.027	100%	85,60%	18.258.173
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	43.209.200	-	100%	0,00%	43.209.200
	TOTAL	15.550.235.262	14.890.068.849	100%	95,75%	660.166.413

Dumai, Januari 2024

Kepala,



SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681025 199002 1 001